

TREN DAN ARAH PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA: SEBUAH PENELITIAN BIBLIOMETRIK

Yaen Miftakhul Laily¹⁾, Wydha Mustika Maharani²⁾, Muhamad Nanda Al Hakim Akbar³⁾, Senato Erasandi⁴⁾

^{1,2,3)} Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Indonesia

⁴⁾ Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Indonesia

E-mail: yaenmiftakhul@unej.ac.id¹⁾, wydhamustika@unej.ac.id²⁾, nandaalhakim@unej.ac.id³⁾, senatoerasandi@unej.ac.id⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren dan arah penelitian kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia menggunakan pendekatan bibliometrik. Data diperoleh dari publikasi ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan inklusif selama dekade terakhir yang diambil dari database Scopus. Metode analisis menggunakan bibliometrix yang dijalankan melalui R Studio dan VOSviewer untuk mengidentifikasi pola kolaborasi antar peneliti, tren topik, serta pengaruh masing-masing publikasi terhadap perkembangan kebijakan pendidikan inklusif. Temuan menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi yang membahas isu-isu pendidikan inklusif, menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap realisasi pendidikan yang adil dan non-diskriminatif. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa topik penelitian masih didominasi oleh tema-tema seperti kesiapan sekolah, kompetensi guru, dan implementasi kebijakan pemerintah. Meskipun terdapat kecenderungan kolaborasi antara peneliti dan lembaga, kontribusi penelitian masih terkonsentrasi di beberapa perguruan tinggi besar. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat peluang untuk memperluas penelitian menuju evaluasi efektivitas kebijakan, penerapan praktik terbaik, dan eksplorasi pendekatan inovatif guna memperkuat implementasi pendidikan inklusif di Indonesia secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *inclusive education; education policy; bibliometric analysis; research trends.*

Abstract

This study aims to analyze the trends and directions of inclusive education policy research in Indonesia using a bibliometric approach. Data were obtained from scientific publications related to inclusive education policy during the last decade. The findings reveal a significant increase in the number of publications addressing issues of inclusive education, indicating growing attention toward the realization of equitable and non-discriminatory education. Further analysis shows that the research topics are still dominated by themes such as school readiness, teacher competence, and the implementation of government policies. Although there is a tendency toward collaboration among researchers and institutions, research contributions remain concentrated in several major higher education institutions. This study concludes that there are opportunities to expand research toward evaluating policy effectiveness, applying best practices, and exploring innovative approaches in order to strengthen the implementation of inclusive education in Indonesia in a more comprehensive and sustainable manner.

Keywords: *inclusive education; education policy; bibliometric analysis; research trends.*

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan kerangka kerja fundamental yang menegaskan hak setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, budaya, atau fisik, untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Prinsip ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga komitmen hukum dan institusional di tingkat internasional maupun nasional. Secara global, pendidikan inklusif telah diperkuat melalui kerangka kebijakan kunci seperti Deklarasi Salamanca 1994, yang mendorong sekolah untuk mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi mereka, dan Agenda Pendidikan 2030, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4, yang menekankan pentingnya memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua (Leijen dkk., 2021; Pirchio dkk., 2022; Winzer & Mazurek, 2020). Komitmen-komitmen ini menandai pergeseran paradigma dari sistem pendidikan yang terpisah menuju sistem yang mengadopsi keragaman, keadilan, dan partisipasi sebagai pilar praktik pendidikan.

Di Indonesia, mandat global ini diimplementasikan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun (Irvan & Jauhari, 2018; Ismiatun & Atika, 2020). Undang-undang tersebut secara eksplisit menguraikan tanggung jawab negara untuk memastikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua, termasuk kelompok marginal seperti anak-anak dengan disabilitas, anak-anak dari daerah terpencil atau kurang beruntung, dan mereka yang memiliki bakat intelektual atau artistik yang luar biasa. Implementasi prinsip ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, yang memberikan pedoman spesifik untuk organisasi dan pengelolaan pendidikan inklusif di sekolah. Peraturan ini menekankan perlunya sekolah menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, infrastruktur, dan layanan pendukung

untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa, sehingga menciptakan lingkungan di mana setiap siswa dapat mencapai potensi penuh mereka (Irvan & Jauhari, 2018; Ismiatun & Atika, 2020).

Melalui praktiknya, perjalanan menuju pendidikan inklusif sepenuhnya di Indonesia tetap kompleks dan multifaset. Tantangan seperti kurangnya kesiapan guru, fasilitas yang tidak memadai, stigma sosial, dan dana yang tidak mencukupi sering menghambat implementasi kebijakan inklusif secara efektif. Meskipun demikian, keselarasan berkelanjutan antara peraturan nasional dengan standar internasional menyoroti komitmen Indonesia untuk mengembangkan pendidikan inklusif sebagai hak asasi manusia dan alat untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya berkelanjutan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap norma internasional, tetapi juga aspirasi yang lebih luas untuk menumbuhkan masyarakat yang adil dan demokratis melalui kesempatan pendidikan yang setara bagi semua peserta didik.

Instrumen regulasi ini memiliki kejelasan normatif, praktik pendidikan inklusif di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi seringkali tidak sejalan dengan kerangka kebijakan, sehingga mengungkapkan kesenjangan yang persisten antara kebijakan dan praktik. Beberapa studi mengidentifikasi hambatan utama, termasuk ketidakcukupan kompetensi guru dalam menangani kebutuhan beragam peserta didik dengan kebutuhan khusus, infrastruktur pendidikan dan sumber daya belajar yang terbatas, dukungan keuangan yang tidak memadai dari pemerintah daerah, serta tingkat kesadaran publik yang rendah mengenai pentingnya pendidikan inklusif (Ediyanto dkk., 2021; Ismiatun & Atika, 2020). Selain itu, ketidakmerataan komitmen regional berkontribusi pada implementasi yang tidak merata di berbagai daerah, sehingga membatasi efektivitas keseluruhan inisiatif pendidikan inklusif (Ediyanto dkk., 2021; Irvan & Jauhari, 2018). Hambatan-hambatan ini menyoroti

tidak hanya kendala manajerial dan administratif, tetapi juga kompleksitas struktural dalam menerjemahkan prinsip-prinsip inklusif ke dalam praktik pembelajaran di kelas.

Diskursus akademik tentang pendidikan inklusif di Indonesia terus berkembang. Namun, tubuh literatur yang ada masih terfragmentasi, dengan banyak studi fokus pada studi kasus terisolasi atau masalah implementasi spesifik wilayah, sehingga menghasilkan pemahaman yang terbatas tentang tren penelitian yang lebih luas di bidang ini (Artiles dkk., 2006). Untuk mengatasi keterbatasan ini, analisis bibliometrik berfungsi sebagai pendekatan metodologis strategis untuk memetakan tren ilmiah dalam penelitian pendidikan inklusif. Melalui identifikasi penulis berpengaruh, institusi, dan bidang tematik, bibliometrik memfasilitasi analisis yang lebih komprehensif tentang perkembangan sepanjang waktu, jaringan kolaboratif, dan celah penelitian (Artiles dkk., 2006; D'Alessio & Watkins, 2009; Pirchio dkk., 2022). Selain itu, wawasan bibliometrik dapat memberikan masukan berharga untuk mengoptimalkan agenda penelitian masa depan, terutama dalam mengidentifikasi subtopik yang kurang dieksplorasi seperti pengembangan kurikulum inklusif, pengembangan profesional guru, dan penggunaan teknologi bantu, sehingga memperkuat integrasi pendidikan inklusif di semua tingkatan pendidikan dan wilayah.

Akibatnya, pendekatan ini berkontribusi pada pembentukan kebijakan berbasis bukti dan mempercepat formulasi strategi pendidikan inklusif yang efektif di Indonesia (Artiles dkk., 2006; D'Alessio & Watkins, 2009). Sesuai dengan pertimbangan di atas, studi ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan tren penelitian tentang kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia melalui pendekatan bibliometrik. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk memetakan pertumbuhan publikasi ilmiah, mengidentifikasi tema-tema dominan, mengeksplorasi jaringan kolaborasi antara penulis dan institusi, serta mengungkap celah penelitian yang memerlukan

penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya diharapkan dapat memperkaya formulasi kebijakan pendidikan inklusif yang didasarkan pada bukti empiris dan menjadi acuan bagi peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat praktik pendidikan inklusif di masa depan (D'Alessio & Watkins, 2009; Rosyidah & Rindanigsih, 2024). Oleh karena itu, semakin penting untuk melakukan analisis bibliometrik guna memperoleh pemahaman komprehensif dan sistematis tentang perkembangan terkini penelitian pendidikan inklusif di Indonesia, sehingga kebijakan dan praktik di masa depan dapat dirumuskan berdasarkan bukti yang kokoh dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif semakin diakui sebagai prinsip dasar dalam bidang pendidikan, memastikan bahwa semua peserta didik, tanpa memandang kemampuan, status sosial-ekonomi, latar belakang budaya, atau lokasi geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memperoleh manfaat dari pendidikan berkualitas tinggi. Prinsip ini pertama kali diungkapkan dalam Pernyataan Salamanca pada tahun 1994, yang menegaskan bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus, dalam lingkungan belajar bersama (Winzer & Mazurek, 2020). Signifikansi global komitmen ini kemudian diperkuat melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 4, yang menyerukan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta promosi kesempatan belajar seumur hidup bagi semua (Artiles dkk., 2006; Ediyanto dkk., 2021).

Secara krusial, pendidikan inklusif melampaui pemahaman sempit tentang sekadar mengintegrasikan siswa dengan disabilitas ke dalam sekolah umum. Ainscow, Booth, dan Dyson (2006) menekankan bahwa inklusi adalah proses komprehensif yang memerlukan transformasi

dalam budaya sekolah, kebijakan, dan praktik untuk merespons secara efektif kebutuhan beragam siswa (Mansur dkk., 2023). Oleh karena itu, pendidikan inklusif harus dilihat sebagai proses yang terus berkembang yang mendorong fleksibilitas dan responsivitas dalam sistem pendidikan. Selain itu, pendidikan inklusif tidak hanya ditujukan bagi siswa dengan disabilitas; melainkan mencakup semua individu yang mungkin termarjinalisasi akibat faktor seperti kemiskinan, gender, etnis, latar belakang bahasa, atau isolasi geografis (Rosyidah & Rindanigsih, 2024). Konsepsi luas ini memandang pendidikan inklusif sebagai isu keadilan sosial yang bertujuan menghilangkan hambatan yang menghalangi partisipasi penuh dalam proses belajar (Ediyanto dkk., 2021).

Bagi guru dan praktisi, realisasi pendidikan inklusif menuntut perubahan paradigma dari memandang perbedaan peserta didik sebagai hambatan menjadi peluang untuk memperkaya lingkungan pendidikan (Ediyanto dkk., 2021). Memupuk praktik inklusif berarti mempromosikan pembelajaran kolaboratif, pedagogi yang fleksibel, dan penilaian yang sensitif terhadap konteks untuk mendukung beragam kebutuhan peserta didik.

Di Indonesia, prinsip-prinsip pendidikan inklusif telah tertanam kuat dalam peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap warga negara untuk mengakses pendidikan tanpa memandang kondisi sosial atau fisik. Hal ini diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, yang mewajibkan lembaga pendidikan untuk menyediakan kesempatan bagi siswa dengan kebutuhan khusus serta mereka yang memiliki bakat luar biasa (Novrizal & Manaf, 2024; Padmadewi dkk., 2024). Meskipun peraturan-peraturan ini sejalan dengan agenda global, implementasinya terus menghadapi tantangan yang signifikan, seperti sumber daya yang tidak memadai, kurangnya kesiapan guru, dan tingkat komitmen regional yang tidak merata (Sari dkk., 2022). Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa

pendidikan inklusif harus dipandang bukan sekadar kebijakan yang didorong oleh kepatuhan, tetapi sebagai proses dinamis dan berkelanjutan yang memerlukan adaptasi berkelanjutan, kolaborasi multisektor, dan komitmen institusional yang kuat.

Mengingat kompleksitas masalah ini, penting untuk melakukan analisis sistematis terhadap literatur akademik guna memahami bagaimana pendidikan inklusif telah dikonseptualisasikan dan diimplementasikan dalam konteks yang beragam. Metode bibliometrik menyediakan cara efektif untuk mengidentifikasi tren penelitian, penulis dan institusi berpengaruh, serta jaringan kolaboratif, sekaligus menyoroti celah penelitian yang persisten (Rosyidah & Rindanigsih, 2024). Pemetaan perkembangan penelitian pendidikan inklusif sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan dan praktik nasional dengan kerangka kerja global, serta untuk menginformasikan strategi masa depan yang bertujuan mencapai kesetaraan pendidikan dan inklusi sosial. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial dalam pembentukan kebijakan berbasis bukti dan mendukung pemangku kepentingan dalam mempromosikan pendidikan inklusif di Indonesia dan di luar negeri.

2. Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Komitmen ini secara hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua warga negara, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus (Novrizal & Manaf, 2024). Untuk mengimplementasikan komitmen ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, yang mewajibkan sekolah dasar dan menengah untuk menyediakan layanan yang sesuai bagi anak-anak dengan disabilitas dan mereka yang

memiliki bakat luar biasa (Ediyanto dkk., 2021). Pada tingkat pendidikan tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan pedoman pada tahun 2019 yang menekankan pentingnya perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif bagi mahasiswa dengan disabilitas (Rofiah, 2023). Kebijakan-kebijakan ini juga sejalan dengan norma global, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4), yang bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil bagi semua (Ediyanto dkk., 2021).

Terdapat kerangka kebijakan yang komprehensif, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi hambatan yang signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak sekolah inklusif belum dilengkapi dengan infrastruktur dan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan disabilitas (Rasmitadila dkk., 2022). Kapasitas guru juga tetap menjadi tantangan kritis; sejumlah besar pendidik belum menerima pelatihan yang memadai dalam pedagogi inklusif, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk merespons kebutuhan siswa yang beragam (Rosyidah & Rindanigsih, 2024; Skourdoumbis, 2023). Selain itu, tingkat komitmen pemerintah daerah bervariasi secara signifikan, menyebabkan ketidakmerataan antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana sekolah pedesaan seringkali kekurangan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk menerapkan praktik inklusif (Rasmitadila dkk., 2022).

Tantangan lain terletak pada kesenjangan antara mandat regulasi dan implementasinya. Meskipun kebijakan mewajibkan sekolah untuk mengadopsi pendidikan inklusif, dalam praktiknya, beberapa lembaga masih enggan menerima siswa dengan disabilitas karena kapasitas yang terbatas atau persepsi negatif terhadap disabilitas (Ediyanto dkk., 2021). Alokasi anggaran yang terbatas semakin membatasi kemampuan sekolah untuk menyediakan layanan dukungan esensial seperti ruang sumber daya, teknologi bantu, dan guru pendamping (Lintangsari & Emaliana, 2020;

Susilawati dkk., 2023). Hambatan-hambatan ini menyoroti bahwa pendidikan inklusif harus dilihat tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai proses dinamis dan berkelanjutan yang melibatkan reformasi institusional, sumber daya pendukung, dan perubahan sikap sosial.

Tantangan ini terus berlanjut, kemajuan yang berarti telah dicapai melalui kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan aktor internasional. Inisiatif yang berfokus pada pelatihan guru, pengembangan kurikulum inklusif, dan advokasi publik telah berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan penerimaan pendidikan inklusif di masyarakat Indonesia (Ediyanto dkk., 2021). Namun, untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan inklusif, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih kuat, serta keterlibatan komunitas yang lebih aktif, tetap krusial dalam menjembatani kesenjangan antara formulasi kebijakan dan hasil praktis (Arias-Pastor dkk., 2023; Ismiyatun & Atika, 2020).

Kesimpulannya, kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia mencerminkan komitmen global dan nasional dalam mempromosikan kesetaraan pendidikan dan keadilan sosial. Namun, tantangan yang terus berlanjut terkait keterbatasan sumber daya, pelatihan guru yang tidak memadai, dan persepsi masyarakat yang kurang mendukung menyoroti kebutuhan akan perbaikan kebijakan berbasis bukti. Hal ini, studi bibliometrik sangat penting dalam memetakan bagaimana kebijakan pendidikan inklusif telah dieksplorasi dalam literatur akademik, mengidentifikasi tema-tema yang dominan, dan mengungkap celah penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan strategi pendidikan inklusif di masa depan.

3. Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Inklusif

Implementasi pendidikan inklusif secara global, termasuk di Indonesia, terus menghadapi berbagai tantangan sistemik, pedagogis, dan sosio-budaya, meskipun didukung oleh kerangka kerja internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak-

Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (SDG 4). Meskipun kedua kerangka kerja tersebut mempromosikan realisasi pendidikan inklusif dan berkualitas yang adil bagi semua, menerjemahkan aspirasi global ini menjadi hasil praktis tetap menjadi masalah di banyak negara. Di Indonesia, meskipun landasan hukum untuk pendidikan inklusif telah ditetapkan dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, implementasi kebijakan ini seringkali tidak konsisten dan terfragmentasi (Nur Paikah dkk., 2021; Rahman dkk., 2021).

Salah satu tantangan sistemik yang paling persisten adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Banyak sekolah masih kekurangan aksesibilitas fisik, teknologi bantu, dan bahan pembelajaran yang sesuai untuk mendukung siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus (Rasmitadila dkk., 2022). Masalah kesiapan guru juga sama pentingnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa sejumlah besar pendidik belum menerima pelatihan yang memadai dalam pedagogi inklusif, pengajaran yang dibedakan, atau perencanaan pendidikan individual, yang menyebabkan perasaan tidak siap dan resistensi saat berhadapan dengan siswa yang beragam (Johnson & Erasmus, 2024; Rosyidah & Rindanigsih, 2024). Kekurangan kompetensi profesional ini pada akhirnya mengganggu efektivitas pendidikan inklusif di tingkat kelas.

Di luar dimensi pedagogik, faktor-faktor sosio-budaya juga memainkan peran yang menentukan dalam membentuk keberhasilan pendidikan inklusif. Attitude negatif masyarakat, stigmatisasi, dan kesalahpahaman yang meluas tentang anak-anak dengan disabilitas seringkali menghambat sekolah dan komunitas untuk sepenuhnya mengadopsi praktik inklusif. Kesadaran yang terbatas mengenai hak-hak peserta didik dengan kebutuhan khusus juga berkontribusi pada eksklusi dan marginalisasi di lingkungan pendidikan (Ediyanto dkk., 2021). Persepsi negatif semacam itu

menciptakan lingkungan yang menolak perubahan dan berkontribusi pada persistensi praktik eksklusif.

Ketidakmerataan regional semakin memperumit lanskap pendidikan inklusif di Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik dan dukungan institusional yang lebih kuat, memungkinkan mereka menerapkan praktik inklusif dengan lebih efektif. Sebaliknya, daerah pedesaan dan terpencil sering menghadapi kekurangan yang signifikan dalam sumber daya finansial, manusia, dan material, mengakibatkan ketidaksetaraan yang mencolok dalam akses terhadap pendidikan inklusif berkualitas (Lintangsari & Emaliana, 2020; Rasmitadila dkk., 2022). Masalah lain yang mendesak adalah kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Meskipun peraturan menekankan pentingnya inklusi, mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasinya seringkali lemah. Akibatnya, sekolah mungkin mematuhi kebijakan secara formal tetapi tidak substansial, dan beberapa lembaga terus menolak menerima peserta didik dengan disabilitas (Ediyanto dkk., 2021; Rofiah, 2023). Selain itu, alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pendidikan inklusif membatasi penyediaan layanan esensial seperti guru pendamping, alat bantu, dan ruang sumber daya (Lintangsari & Emaliana, 2020; Susilawati dkk., 2023). Akibatnya, pendidikan inklusif sering beroperasi lebih sebagai komitmen retoris daripada praktik transformatif.

Perlunya cara mengatasi tantangan multidimensi ini, diperlukan strategi komprehensif dan holistik yang menggabungkan dukungan keuangan berkelanjutan, pengembangan profesional guru, keterlibatan aktif komunitas, dan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat. Pengalaman dari konteks lain menunjukkan bahwa program pelatihan guru dan model kolaboratif pembelajaran profesional dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan pendidik dalam mengelola kelas yang beragam (Johnson & Erasmus, 2024; Lacar, 2021; Lambe, 2007). Pada saat yang

sama, memperkuat koordinasi antar lembaga dan memupuk kemitraan multi-pemangku kepentingan akan menjadi esensial untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif melampaui pembicaraan kebijakan semata menuju hasil yang nyata dan adil. Kesimpulannya, tantangan yang terkait dengan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia mencakup dimensi struktural, pedagogis, sosio-budaya, dan kebijakan. Menangani isu-isu ini memerlukan intervensi strategis dan berbasis bukti yang memastikan pendidikan inklusif menjadi kenyataan bagi semua peserta didik. Studi bibliometrik memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi tema-tema dominan dalam literatur yang ada, mengungkap celah penelitian, dan memberikan arahan kebijakan yang mencerminkan kerangka global dan kebutuhan lokal (Rasmitadila dkk., 2022; Rokhim dkk., 2021).

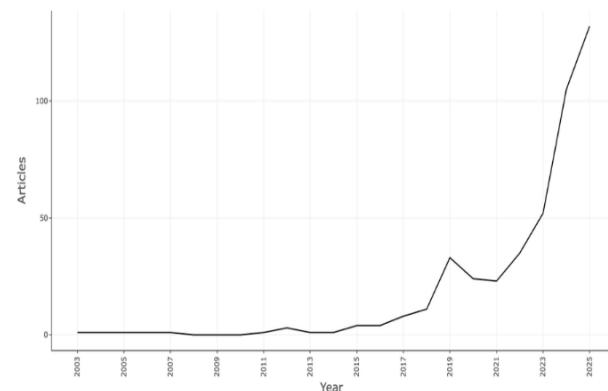
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif berbasis literatur dengan teknik analisis bibliometrik. Data penelitian diperoleh dari basis data Scopus sebagai sumber utama, sementara Dimensions digunakan sebagai alat pengindeksan alternatif untuk artikel dengan DOI spesifik guna memperkuat validitas hasil. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah “pendidikan inklusif di Indonesia” dan variasi kata kunci serupa dalam bahasa Inggris (“*inclusive education in Indonesia*”). Hasil pencarian menunjukkan jumlah publikasi yang terbatas pada topik ini, sebanyak 444 artikel. Jumlah ini menunjukkan bahwa tema pendidikan inklusif di Indonesia relatif baru dan masih dalam tahap awal dibandingkan dengan studi pendidikan inklusif global. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memetakan tren publikasi, arah penelitian, pola kolaborasi antara penulis dan institusi, serta mengidentifikasi celah penelitian. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak bibliometrik seperti R Studio untuk memvisualisasikan jaringan kolaborasi, peta kata kunci (*co-occurrence*), dan distribusi publikasi berdasarkan waktu, institusi, dan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Jumlah Artikel

Hasil penelusuran literatur menggunakan basis data Dimensions dengan kata kunci “pendidikan inklusif di Indonesia” menghasilkan 444 artikel yang terindeks dengan DOI. Jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan publikasi global mengenai pendidikan inklusif, sehingga menegaskan bahwa kajian pendidikan inklusif di Indonesia masih tergolong tema penelitian baru dan terus berkembang.



Gambar 1. Annual Scientific Production
Perkembangan Jumlah Artikel Pertahun

Sumber: Olahan Data Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik terhadap 444 artikel yang terindeks dalam database Dimensions, terlihat adanya perkembangan signifikan dalam publikasi mengenai pendidikan inklusif di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2025. Pada periode awal (2000–2010), jumlah publikasi masih sangat rendah dan cenderung stagnan, mencerminkan bahwa isu pendidikan inklusif belum menjadi perhatian utama dalam kajian akademik. Mulai tahun 2015, terjadi peningkatan meski masih dalam skala terbatas, sejalan dengan semakin kuatnya dorongan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah. Lompatan yang cukup signifikan muncul pada tahun 2018–2019, ditandai dengan meningkatnya jumlah artikel lebih dari dua kali lipat dibanding periode sebelumnya. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020–2021, tren publikasi kembali naik tajam sejak 2022. Peningkatan paling drastis terjadi pada 2023–2025, dengan jumlah publikasi yang

melampaui 100 artikel per tahun, bahkan mencapai titik tertinggi pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kajian tentang pendidikan inklusif di Indonesia sedang mengalami pertumbuhan pesat, dan mulai menarik perhatian luas para peneliti lintas disiplin.

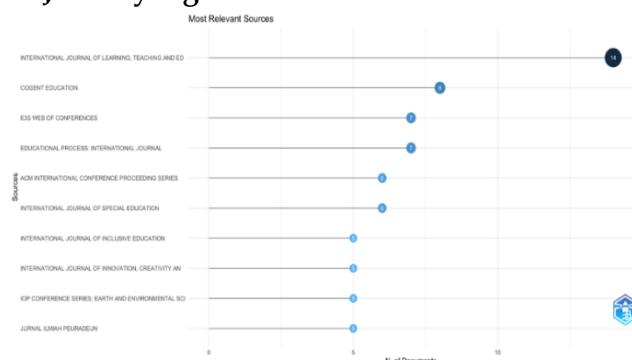
Kecenderungan ini menegaskan bahwa meskipun penelitian mengenai pendidikan inklusif tergolong tema baru, namun dalam lima tahun terakhir isu ini berkembang menjadi salah satu topik penting dalam diskursus pendidikan di Indonesia. Lonjakan publikasi ini dapat dihubungkan dengan semakin besarnya tuntutan terhadap pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, dukungan kebijakan pemerintah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dan akademisi terhadap pentingnya pendidikan yang setara dan inklusif.

Selain itu, peningkatan signifikan ini juga selaras dengan agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-4 mengenai pendidikan berkualitas yang menekankan inklusivitas dan kesetaraan. Integrasi isu-isu global ke dalam kebijakan nasional mendorong semakin banyak peneliti Indonesia untuk mengeksplorasi pendekatan, strategi, serta praktik terbaik dalam implementasi pendidikan inklusif. Tren pertumbuhan publikasi yang sangat tajam pada periode 2022–2025 juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi riset, dari sekadar kajian konseptual menuju penelitian yang lebih aplikatif, seperti evaluasi program, analisis kebijakan, maupun studi tentang pengalaman sekolah dalam menerapkan praktik inklusif. Hal ini memberikan sinyal positif bahwa riset pendidikan inklusif tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga mengalami pendalaman secara substansial.

Dengan demikian, pola peningkatan publikasi ini tidak hanya menggambarkan popularitas topik, tetapi juga menandakan terbentuknya basis pengetahuan yang semakin kokoh dalam mendukung pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Tren ini diharapkan dapat

berkontribusi pada lahirnya rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif.

2. Jurnal yang relevan



Gambar 2. Sepuluh jurnal paling relevan

Sumber: Olahan Data Peneliti (2025)

Hasil bibliometrik menunjukkan bahwa publikasi tentang pendidikan inklusif di Indonesia paling banyak dimuat dalam International Journal of Learning, Teaching and Education (14 artikel) dan Cogent Education (9 artikel). Dominasi dua jurnal ini menunjukkan bahwa isu inklusi di Indonesia terutama dikaji dari perspektif praktik pembelajaran dan pengembangan pendidikan secara global. Dengan kata lain, penelitian inklusi di Indonesia lebih banyak diletakkan dalam kerangka pedagogis, bukan sekadar kebijakan atau regulasi.

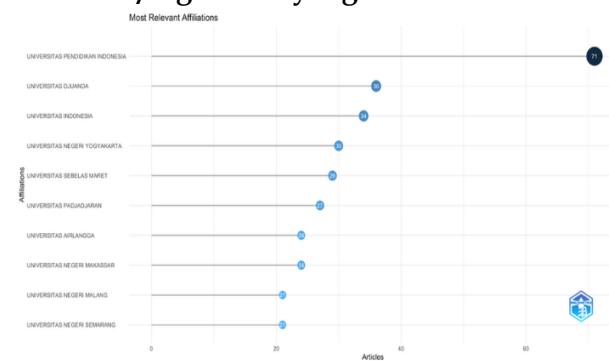
Sementara itu, keberadaan artikel di jurnal khusus seperti International Journal of Special Education dan International Journal of Inclusive Education menandakan bahwa penelitian tentang inklusi di Indonesia telah mulai masuk ke ranah spesialisasi internasional. Hal ini mengindikasikan adanya perhatian terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dalam kerangka pendidikan inklusif yang lebih komprehensif. Selain jurnal, prosiding konferensi internasional seperti E3S Web of Conferences dan AIP International Conference Proceeding Series juga menjadi saluran publikasi yang cukup signifikan. Fenomena ini mencerminkan bahwa peneliti di Indonesia banyak memanfaatkan forum akademik global untuk

mempercepat penyebaran gagasan dan temuan baru tentang pendidikan inklusif.

Di tingkat nasional, Jurnal Ilmiah Peuradeun tercatat sebagai salah satu sumber penting, menunjukkan adanya upaya internal untuk mengembangkan diskursus pendidikan inklusif sesuai dengan Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan dominasi jurnal internasional, publikasi nasional masih relatif terbatas. Secara kritis, pola distribusi ini menunjukkan bahwa penelitian pendidikan inklusif di Indonesia lebih banyak diarahkan untuk mendapatkan pengakuan global, tetapi masih menghadapi tantangan dalam memperkuat basis ilmiah di level nasional. Padahal, agar berdampak langsung pada kebijakan pendidikan di Indonesia, diperlukan lebih banyak publikasi yang berorientasi lokal dengan fokus pada sosial, budaya, dan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di lapangan.

Selain itu, dominasi publikasi di jurnal internasional juga memperlihatkan bahwa wacana pendidikan inklusif di Indonesia sering kali dibingkai dengan standar global yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan realitas lokal. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik, karena solusi yang ditawarkan dalam penelitian mungkin lebih menekankan pada generalisasi akademik dibandingkan dengan kebutuhan nyata sekolah, guru, maupun peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia. Oleh karena itu, tantangan ke depan bukan hanya memperbanyak jumlah publikasi, tetapi juga memastikan relevansi penelitian dengan konteks implementasi kebijakan inklusi di tingkat daerah, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

3. Afiliasi/organisasi yang relevan



Gambar 3. Sepuluh Afiliasi/Organisasi Paling Relevan

Sumber: Olahan Data Peneliti (2025)

Hasil analisis bibliometrik pada gambar di atas memperlihatkan bahwa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi institusi dengan kontribusi publikasi terbesar terkait pendidikan inklusif, yakni sebanyak 71 artikel. Dominasi UPI ini dapat dipahami mengingat karakter institusinya yang berfokus pada pendidikan dan pedagogi, sehingga secara konsisten mendorong penelitian dalam isu inklusi. Posisi berikutnya ditempati oleh Universitas Brawijaya (34 artikel), Universitas Indonesia (31 artikel), dan Universitas Negeri Yogyakarta (29 artikel), yang menunjukkan adanya perhatian serius dari perguruan tinggi besar di Indonesia terhadap isu kesetaraan akses pendidikan.

Menariknya, kontribusi publikasi juga muncul dari universitas non-LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), seperti Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya, yang menandakan bahwa diskursus pendidikan inklusif tidak hanya menjadi ranah fakultas keguruan, tetapi juga telah diperluas ke bidang interdisipliner, seperti kesehatan, hukum, dan ilmu sosial. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa pendidikan inklusif merupakan isu lintas sektor, bukan semata-mata persoalan pedagogi.

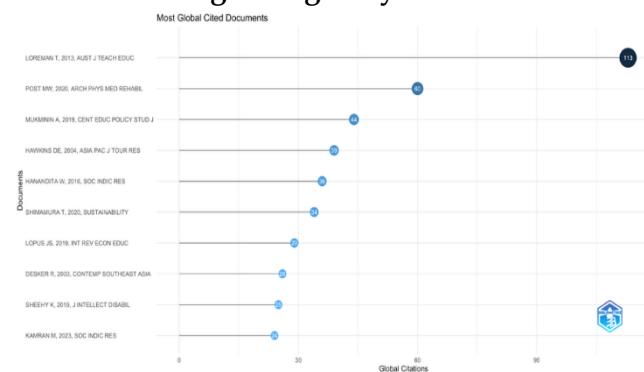
Secara kritis, pola distribusi afiliasi ini masih memperlihatkan konsentrasi penelitian pada universitas besar di Pulau Jawa. Keterlibatan perguruan tinggi di luar Jawa relatif minim, sehingga wacana pendidikan inklusif berpotensi bias terhadap konteks sosial-budaya tertentu dan

kurang merepresentasikan keragaman kondisi di Indonesia, khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan. Padahal, agar kebijakan inklusi lebih relevan dan berdampak, diperlukan kontribusi riset dari perguruan tinggi di daerah untuk menggambarkan realitas lokal secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, temuan ini menegaskan pentingnya memperluas jejaring penelitian dan kolaborasi antar universitas, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memperkaya perspektif serta memperkuat basis ilmiah kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Kolaborasi lintas institusi tidak hanya akan meningkatkan kuantitas publikasi, tetapi juga mampu memperdalam kualitas penelitian melalui pertukaran metodologi, diversifikasi pendekatan teoritis, serta perluasan cakupan kajian berdasarkan konteks sosial-budaya yang berbeda. Upaya kolaboratif juga berpotensi mengurangi kesenjangan kontribusi antarwilayah, khususnya dengan mendorong perguruan tinggi di luar Jawa agar lebih aktif berpartisipasi dalam riset inklusi.

Lebih jauh lagi, jejaring penelitian dengan mitra internasional dapat membuka ruang bagi pembelajaran timbal balik (*mutual learning*) antara Indonesia dan negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan kebijakan inklusi secara mapan. Hal ini dapat mempercepat proses adaptasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal sekaligus menempatkan Indonesia dalam arus global diskursus pendidikan inklusif. Oleh karena itu, mendorong terbentuknya ekosistem riset yang kolaboratif, berorientasi kontekstual, dan berbasis bukti menjadi kunci dalam memperkuat landasan akademik sekaligus mendukung perumusan kebijakan yang responsif terhadap realitas pendidikan inklusif di Indonesia.

4. Artikel Yang Paling Banyak Disitasi



Gambar 4. Sepuluh artikel yang paling banyak disitasi

Sumber: Olahan Data Peneliti (2025)

Gambar 4 menampilkan sepuluh dokumen dengan jumlah sitasi global tertinggi dalam bidang pendidikan inklusif. Terlihat bahwa sebagian besar sitasi terkonsentrasi pada beberapa karya tertentu yang memiliki pengaruh besar, sementara sebagian lainnya memperoleh sitasi yang relatif lebih rendah. Konsentrasi ini menunjukkan bahwa terdapat literatur kunci yang menjadi rujukan utama dalam pengembangan wacana pendidikan inklusif di tingkat internasional.

Secara konsisten, sepuluh artikel teratas menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif ditentukan oleh keterhubungan multi-level: (1) kebijakan (legal review, kebijakan Perguruan Tinggi untuk mahasiswa difabel) menyediakan mandat dan akomodasi; (2) reform kurikulum menggeser orientasi dari eksklusif ke inklusif; (3) kompetensi & kesiapan guru (pengetahuan, sikap, keyakinan epistemologis) menjadi pengungkit implementasi di kelas; (4) suara dan pengalaman siswa memastikan pendekatan benar-benar responsif, termasuk pada konteks komunitas adat dan kebutuhan komunikasi alternatif; (5) ketangguhan sistem pendidikan (DRR untuk infrastruktur sekolah) menjaga akses setara pada situasi krisis. Artikel dengan kutipan total tertinggi membentuk fondasi konseptual (kesiapan guru, reform kurikulum, sikap/kepercayaan), sedangkan artikel dengan sitasi/tahun tertinggi menangkap arus terbaru: regulasi inklusi, inklusi pada komunitas adat, kebijakan Perguruan Tinggi ramah

difabel, dan integrasi ketangguhan bencana. Pola ini memperkuat argumentasi SLR Anda bahwa peningkatan inklusivitas tidak cukup hanya di ranah kurikulum; ia memerlukan sinkronisasi kebijakan-institusi-guru-siswa serta desain layanan diferensiatif (komunikasi alternatif, dukungan autisme) dan perencanaan ketangguhan. Dengan demikian, daftar 10 artikel ini dapat dijadikan landasan teori dan peta bukti untuk merumuskan indikator kinerja (akses, partisipasi, akomodasi, hasil belajar, iklim toleransi) serta mengidentifikasi celah riset prioritas (implementasi di Perguruan Tinggi, komunitas adat, dan kesiapan sistem pada kondisi darurat).

Secara akademik, pola tersebut mengindikasikan adanya hierarki pengetahuan, di mana penelitian yang bersifat konseptual, metodologis, atau menawarkan kerangka teoritis yang kuat cenderung lebih banyak dijadikan acuan. Sebaliknya, karya yang lebih kontekstual atau berbasis praktik masih berjuang untuk mendapatkan visibilitas yang sebanding di ranah global.

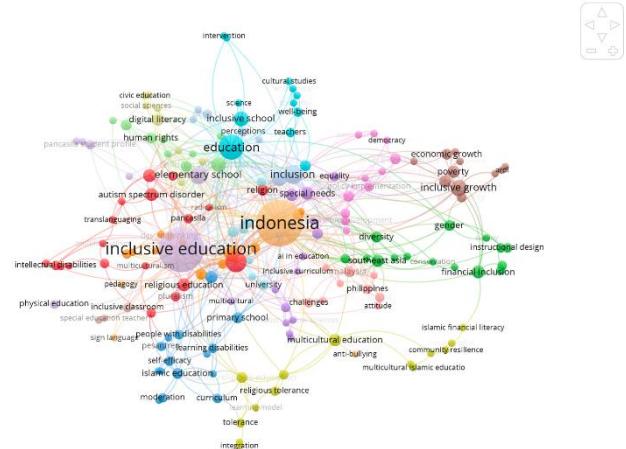
Pendidikan inklusif di Indonesia, kondisi ini memberikan refleksi penting bahwa arah pengembangan penelitian pendidikan inklusif masih menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan lokal dan mengejar pengakuan global. Jika publikasi nasional ingin mendapatkan pengakuan yang lebih luas, maka diperlukan strategi penelitian dan publikasi yang tidak hanya menekankan keunikan konteks sosial, budaya, dan kebijakan pendidikan di Indonesia, tetapi juga mampu mengaitkan temuan lokal tersebut dengan isu-isu global yang sedang berkembang, seperti keberlanjutan, keadilan sosial, dan akses pendidikan yang setara. Dengan demikian, penelitian pendidikan inklusif dari Indonesia tidak berhenti sebagai laporan praktik baik semata, melainkan dapat diposisikan sebagai kontribusi teoritis maupun metodologis yang relevan bagi diskursus akademik internasional.

Upaya ini akan membawa dua dampak strategis sekaligus. Pertama, memperkuat legitimasi

akademik Indonesia di kancah global melalui pengakuan atas kekhasan pengalaman dan praktik inklusi yang berkembang di dalam negeri. Kedua, memberikan dasar yang lebih kuat bagi penyusunan kebijakan nasional yang berorientasi pada bukti (*evidence-based policy*), karena hasil penelitian tidak hanya diuji dalam lingkup lokal, tetapi juga dalam perbandingan dengan berbagai konteks internasional. Dengan cara ini, posisi Indonesia dapat bergerak dari sekadar penerima ide dan model pendidikan inklusif dari luar negeri menjadi produsen pengetahuan yang aktif membentuk arah perkembangan wacana global mengenai pendidikan inklusif.

5. Visualisasi Area Topik

Visualisasi network co-occurrence yang menggunakan perangkat lunak VOSviewer ini menggambarkan hubungan antara berbagai kata kunci dalam literatur tentang pendidikan inklusif dengan total 17 cluster dan 178 item (kata kunci atau topik). Pusat dari visualisasi ini menunjukkan dua tema dominan: "Pendidikan Inklusif" dan "Indonesia". Ini mengindikasikan bahwa literatur yang dipetakan sangat berfokus pada pendidikan inklusif di Indonesia, dengan peran penting yang dimainkan oleh berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan kebijakan dalam pengimplementasiannya.



Gambar 5. Visualisasi Jaringan Penelitian

Sumber: Olahan Data Peneliti (2025)

Visualisasi ini terbagi menjadi beberapa cluster tematik yang saling berhubungan, masing-

masing mencerminkan area-area yang berbeda dalam kajian pendidikan inklusif. Di antara 17 cluster tersebut, kita dapat melihat cluster merah yang menyoroti topik-topik terkait pendidikan dan kurikulum, dengan kata kunci seperti *inclusive school*, *curriculum reform*, dan *inclusive classroom* yang menunjukkan upaya untuk mengubah dan memperbaiki sistem kurikulum agar lebih inklusif. Cluster hijau, yang mencakup kata kunci seperti Southeast Asia, Malaysia, Philippines, memperlihatkan pentingnya perbandingan antara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, mencerminkan dinamika serupa yang terjadi di kawasan ini. Sementara itu, cluster biru yang berfokus pada topik-topik terkait disabilitas, seperti *autism spectrum disorder*, *intellectual disabilities*, dan *physical education*, menggarisbawahi perhatian besar pada pengembangan dan penyesuaian pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.

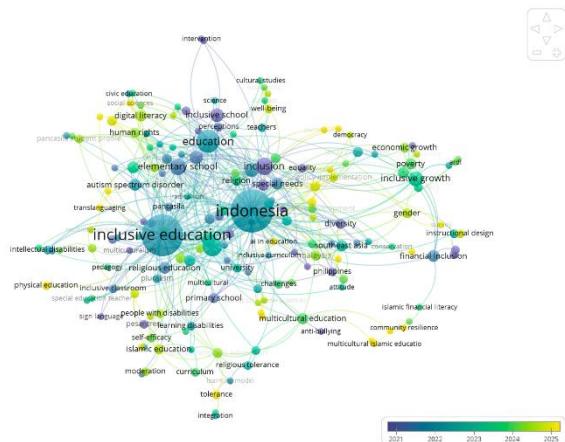
Selain itu, cluster kuning, yang mengangkat tema pendidikan multikultural, menunjukkan pentingnya toleransi, integrasi, dan keberagaman budaya dalam pendidikan inklusif. Pendidikan yang mengakomodasi keragaman budaya dan agama menjadi sangat penting, terutama dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman. Di sisi lain, cluster ungu yang berfokus pada pendekatan pedagogis menunjukkan hubungan erat antara *pedagogical approaches*, *teaching*, dan *self-efficacy* para guru, yang mengindikasikan bahwa peran pengajaran yang efektif sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif.

Selain itu, terdapat cluster coklat yang membahas hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan inklusi sosial, menunjukkan bahwa pendidikan inklusif juga terkait erat dengan konteks sosial-ekonomi yang lebih besar. Kata kunci seperti *inclusive growth*, *public policy*, dan *economic development* menunjukkan bahwa inklusi sosial tidak hanya mengenai pendidikan di kelas, tetapi juga terkait dengan pemerataan akses pendidikan yang dapat

mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Visualisasi ini juga memperlihatkan hubungan yang kuat antar cluster, misalnya antara pendekatan pedagogis dengan kelas inklusif, serta antara pertumbuhan ekonomi dengan inklusi sosial. Hal ini menegaskan bahwa diskusi mengenai pendidikan inklusif di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek kurikulum dan pedagogi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan kebijakan yang lebih luas. Terdapat pula beberapa cluster lebih kecil yang menarik, seperti inklusi finansial dan ketahanan komunitas, yang mengindikasikan bahwa literatur juga memperhatikan pentingnya mendukung inklusi dalam bidang ekonomi dan ketahanan sosial, dengan fokus pada akses pendidikan yang merata dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil visualisasi ini menggambarkan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang lebih besar, termasuk kebijakan pendidikan, pendekatan pedagogis yang inklusif, serta isu-isu sosial-ekonomi seperti kemiskinan, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pentingnya pendekatan multikultural dan toleransi dalam pendidikan menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya masalah aksesibilitas fisik, tetapi juga tentang menerima keberagaman budaya dan sosial yang ada. Dengan demikian, visualisasi ini memberikan gambaran yang holistik mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara lebih luas.



Gambar 6. Visualisasi Overlay Penelitian

Sumber: Olahan Data Peneliti (2025)

Visualisasi *overlay network* yang dihasilkan menggunakan perangkat lunak VOSviewer menunjukkan perkembangan tren dan hubungan antar kata kunci yang terkait dengan pendidikan inklusif, terutama di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Hasil visualisasi ini membagi 178 kata kunci menjadi 17 cluster, dengan setiap kata kunci diwakili oleh titik yang ukurannya mencerminkan frekuensi kemunculannya dalam literatur yang dipetakan. Warna pada titik-titik ini menunjukkan distribusi waktu, mulai dari tahun 2021 hingga 2025, dengan gradien warna yang mengindikasikan waktu yang semakin baru (hijau-2024 hingga kuning-2025). Visualisasi ini tidak hanya mengungkapkan dinamika pertumbuhan literatur mengenai pendidikan inklusif, tetapi juga mencerminkan bagaimana berbagai isu sosial, ekonomi, dan kebijakan berkembang seiring berjalannya waktu.

Pada pusat visualisasi, "pendidikan inklusif" dan "Indonesia" menjadi dua kata kunci dominan yang menghubungkan hampir seluruh elemen lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa literatur yang dipetakan sangat fokus pada konteks Indonesia dalam implementasi pendidikan inklusif. Terlihat pula bahwa kata kunci yang paling sentral, seperti "*inclusive education*", muncul dengan warna yang lebih muda (2021-2022), menandakan bahwa topik ini berkembang pesat di awal dekade ini. Ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif telah

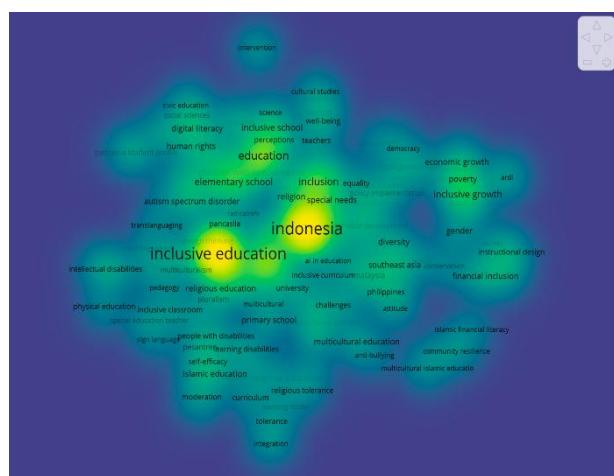
menjadi fokus penting dalam sistem pendidikan Indonesia, dengan perhatian yang besar terhadap keberagaman dalam ruang kelas dan penerapan kurikulum inklusif.

Di sisi lain, visualisasi ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tema utama yang semakin mendapat perhatian dalam literatur lebih baru. Kata kunci seperti "*inclusive growth*", "*economic growth*", dan "*financial inclusion*" mulai muncul dengan dominasi warna hijau dan kuning yang mewakili tahun 2023 hingga 2025, mengindikasikan peningkatan pembahasan tentang bagaimana pendidikan inklusif dapat berkontribusi pada pertumbuhan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif. Aspek ini menggarisbawahi hubungan erat antara pendidikan inklusif dan isu-isu ekonomi, dengan fokus pada bagaimana pendidikan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung.

Sementara itu, cluster keberagaman sosial yang diwakili oleh kata kunci seperti "*multicultural education*", "*religious tolerance*", dan "*diversity*", menunjukkan bahwa sejak 2023, perhatian terhadap keberagaman budaya dan agama dalam pendidikan inklusif semakin menguat. Ini mencerminkan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya penerimaan terhadap keberagaman sosial dalam pendidikan, terutama di negara seperti Indonesia yang kaya akan budaya dan agama. Sebagai tambahan, cluster yang lebih kecil yang mencakup "*autism spectrum disorder*", "*physical education*", dan "*intellectual disabilities*" tetap menjadi fokus utama, menunjukkan bahwa pendidikan inklusif untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus tetap menjadi topik penting yang tidak pernah kehilangan relevansinya.

Secara keseluruhan, visualisasi *overlay* ini memperlihatkan perubahan dinamis dalam literatur mengenai pendidikan inklusif di Indonesia dan Asia Tenggara. Sementara isu terkait pendidikan inklusif bagi anak dengan disabilitas tetap menjadi topik utama, terdapat perkembangan jelas menuju pemahaman yang lebih holistik, yang mengaitkan

pendidikan inklusif dengan isu-isu sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan inklusi finansial. Terlebih lagi, dengan semakin banyaknya pembahasan mengenai toleransi agama, keberagaman budaya, dan pendidikan multikultural, dapat dilihat bahwa literatur ini juga memperluas cakupan pendidikan inklusif tidak hanya dalam konteks fisik di kelas, tetapi juga dalam aspek sosial dan kultural. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga berperan besar dalam mempromosikan kesetaraan sosial dan ekonomi.



Gambar 7. Visualisasi Kepadatan Kata Kunci pada Penelitian

Sumber: Olahan Data Peneliti (2025)

Visualisasi *density map* di atas menggambarkan perkembangan dan intensitas dari berbagai tema terkait pendidikan inklusif di Indonesia dan Asia Tenggara. Titik pusat dari visualisasi ini didominasi oleh dua kata kunci utama, yaitu "pendidikan inklusif" dan "Indonesia", yang menunjukkan bahwa literatur terkait sangat berfokus pada bagaimana pendidikan inklusif diterapkan di Indonesia. Warna kuning terang di pusat visualisasi menandakan bahwa topik ini sangat sering dibahas dalam literatur terkini, terutama setelah 2021.

Selain itu, visualisasi ini juga menunjukkan adanya hubungan erat antara pendidikan inklusif dengan isu-isu sosial dan ekonomi. Kata kunci seperti "*inclusive growth*", "*economic growth*",

"*poverty*", dan "*gender*" muncul dengan intensitas yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa semakin banyak pembahasan yang menghubungkan pendidikan inklusif dengan upaya memperbaiki kondisi sosial ekonomi. Topik ini menunjukkan pemahaman bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang menyediakan akses bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk pertumbuhan sosial dan ekonomi yang lebih adil.

Di sisi lain, visualisasi ini juga menyoroti pentingnya keberagaman budaya dan agama dalam pendidikan inklusif. Dengan kemunculan kata kunci seperti "*multicultural education*", "*religious education*", "*religious tolerance*", dan "*diversity*", jelas terlihat bahwa literatur mulai banyak mengarah pada pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam sistem pendidikan. Hal ini relevan dengan konteks Indonesia yang sangat kaya dengan budaya dan agama yang beragam. Literasi mengenai toleransi, pencegahan perundungan, dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman bagi semua siswa.

Selain itu, teknologi pendidikan juga mulai mendapatkan perhatian dalam konteks pendidikan inklusif. Kata kunci seperti "*AI in education*" dan "*instructional design*" menunjukkan bahwa teknologi semakin dianggap sebagai alat yang dapat membantu mendesain pengalaman belajar yang lebih inklusif. Ini mencerminkan semakin berkembangnya pembelajaran berbasis teknologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, seperti mereka yang memiliki disabilitas.

Pentingnya mengintegrasikan pendidikan inklusif dengan pendekatan multikultural, serta mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam proses implementasinya, semakin mendapatkan sorotan. Kata kunci seperti "*challenges*" dan "*inclusive curriculum*" mengungkapkan bahwa meskipun banyak kemajuan telah tercapai, masih ada hambatan-hambatan yang harus diatasi, baik itu

terkait dengan keterbatasan sumber daya, pelatihan guru, maupun kurikulum yang belum sepenuhnya inklusif.

Secara keseluruhan, visualisasi ini menggambarkan bagaimana pendidikan inklusif di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara berkembang menjadi tema yang semakin kompleks dan multidimensional. Isu-isu sosial-ekonomi, keberagaman budaya dan agama, serta penerapan teknologi dalam pendidikan semakin dihubungkan dengan konsep pendidikan inklusif, mencerminkan sebuah pemahaman yang lebih holistik. Dengan perhatian yang semakin besar pada toleransi sosial, inklusi finansial, dan peran pendidikan dalam memperbaiki kondisi sosial, pendidikan inklusif bukan hanya dilihat sebagai cara untuk menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang terpinggirkan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.

PENUTUP

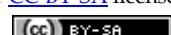
Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir. Analisis bibliometrik terhadap publikasi-publikasi ilmiah, terlihat bahwa topik pendidikan inklusif semakin mendapat perhatian, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan pemerintah dan berbagai tantangan di lapangan. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Selain itu, terdapat kecenderungan meningkatnya kolaborasi antara peneliti dan lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, meskipun sebagian besar penelitian masih terkonsentrasi pada institusi pendidikan tinggi tertentu sehingga persebaran pengetahuan belum sepenuhnya merata ke seluruh wilayah.

Secara umum, fokus penelitian masih berkutat pada isu-isu seperti kesiapan sekolah, kompetensi guru, serta dukungan kebijakan dalam pelaksanaan

pendidikan inklusif. Padahal, kompleksitas implementasi pendidikan inklusif menuntut adanya kajian yang lebih holistik, termasuk evaluasi efektivitas kebijakan yang sudah berjalan, identifikasi praktik-praktik terbaik di berbagai daerah, serta penerapan pendekatan inovatif dan teknologi dalam mendukung pembelajaran inklusif. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya memperluas cakupan penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga aplikatif dan transformatif. Dengan demikian, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, maupun praktisi pendidikan, serta diversifikasi tema penelitian menjadi langkah strategis guna menghasilkan kebijakan pendidikan inklusif yang lebih komprehensif, adaptif terhadap konteks lokal, dan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Arias-Pastor, M., Van Vaerenbergh, S., Fernández-Solana, J., & González-Bernal, J. J. (2023). Secondary Education Teacher Training and Emotional Intelligence: Ingredients for Attention to Diversity in an Inclusive School for All. *Education Sciences*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/educsci13050519>
- Artiles, A. J., Kozleski, E. B., Dorn, S., & Christensen, C. (2006). Learning in inclusive education research: Re-mediating theory and methods with a transformative agenda. Dalam *Review of Research in Education* (Vol. 30, hlm. 65–108). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.3102/0091732X030001065>
- D'Alessio, S., & Watkins, A. (2009). International Comparisons of Inclusive Policy and Practice: Are We Talking about the Same Thing? *Research in Comparative and International Education*, 4(3), 233–249. <https://doi.org/10.2304/rcie.2009.4.3.233>
- Ediyanto, E., Setiawan, A., Handaka, I., Rofiah, N., & Suhendri, S. (2021). Implementation of Inclusive Education in Learning Process at Senior High School Malang City, Indonesia.



- IJDS: *Indonesian Journal of Disability Studies*, 8(01), 179–189. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2021.008.01.14>
- Irvan, M., & Jauhari, M. N. (2018). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF SEBAGAI PERUBAHAN PARADIGMA PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 14(26), 175–187. <https://doi.org/10.36456/bp.vol14.no26.a1683>
- Ismiatun, A. N., & Atika, A. R. (2020). Facing the Challenges of Inclusive Education in Early Childhood Education. *Proceedings of the International Conference on Early Childhood Education and Parenting 2019 (ECEP 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200808.010>
- Johnson, F., & Erasmus, C. J. (2024). Equipping educators for learning support: A systematic review. *British Journal of Special Education*, 51(3), 296–316. <https://doi.org/10.1111/1467-8578.12522>
- Lacar, J. (2021). Inclusive Education at the Heart of Mainstream Language Pedagogy: Perspectives and Challenges. *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, 4(3), 124–131. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2021.4.3.14>
- Lambe, J. (2007). Student teachers, special educational needs and inclusion education: reviewing the potential for problem-based, e-learning pedagogy to support practice. *Journal of Education for Teaching*, 33(3), 359–377. <https://doi.org/10.1080/02607470701450551>
- Leijen, Å., Arcidiacono, F., & Baucal, A. (2021). The Dilemma of Inclusive Education: Inclusion for Some or Inclusion for All. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.633066>
- Lintangsari, A. P., & Emaliana, I. (2020). Inclusive education services for the blind: Values, roles, and challenges of university EFL teachers. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 9(2), 439. <https://doi.org/10.11591/ijere.v9i2.20436>
- Mansur, H., Utama, A. H., Mohd Yasin, M. H., Sari, N. P., Jamaludin, K. A., & Pinandhita, F. (2023). Development of Inclusive Education Learning Design in the Era of Society 5.0. *Social Sciences*, 12(1), 35. <https://doi.org/10.3390/socsci12010035>
- Novrizal, N., & Manaf, S. (2024). The Policy of Inclusive Education in Indonesia. *Multicultural Islamic Education Review*, 2(1), 37–44. <https://doi.org/10.23917/mier.v2i1.4297>
- Nur Paikah, Achmad Ruslan, Riza, M., & Iin Karita Sakharina. (2021). The Government's Responsibility for the Fulfillment of the Right to Education for Child Labour in Working Relationships. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 15(2), 4231–4243. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v15i2.15036>
- Padmadewi, N. N., Sukadana, I. M. S. A., Artini, L. P., Ana, I. K. T. A., Lesmana, K. Y. P., & Susiani, K. (2024). Inclusive Education: Survey on Teachers' Perception of Its Implementation. *Indonesian Journal of Instruction*, 5(3), 315–330. <https://doi.org/10.23887/iji.v5i3.81932>
- Pirchio, S., Arcidiacono, F., & Passiatore, Y. (2022). Editorial: Inclusive schools for a diverse world: Psychological and educational factors and practices harming or promoting inclusion at school. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1049129>
- Rahman, A., Naldi, W., Arifin, A., & Mujahid R, F. (2021). Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 4(1), 98–107. <https://doi.org/10.31539/joeai.v4i1.2010>
- Rasmitadila, R., Humaira, M. A., Rachmadtullah, R., Sesrita, A., Laeli, S., Muhdiyati, I., & Firmansyah, W. (2022). Teacher Perceptions of University Mentoring Programs Planning for Inclusive Elementary Schools: A Case Study in Indonesia. *International Journal of Special Education*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.23887/ijse.v11i1.10101>



- Education (IJSE)*, 36(2).
<https://doi.org/10.52291/ijse.2021.36.18>
- Rofiah, K. (2023). *Untangling the Knot: Navigating Teacher Doubts in Implementing Inclusive Education in Indonesia* (hlm. 1295–1301).
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_131
- Rokhim, A., Suryadi, S., & Supadi, S. (2021). Evaluation of The Implementation of The Inclusion Program. *International Journal of Elementary Education*, 5(4), 675.
<https://doi.org/10.23887/ijee.v5i4.37217>
- Rosyidah, U., & Rindanigsih, I. (2024). IMPROVING TEACHERS' UNDERSTANDING OF INCLUSIVE EDUCATION. *International Journal Multidisciplinary (IJMI)*, 1(2), 8–15.
<https://doi.org/10.61796/ijmi.v1i2.56>
- Sari, Z. P., Sarofah, R., & Fadli, Y. (2022). The Implementation of Inclusive Education in Indonesia: Challenges and Achievements. *Jurnal Public Policy*, 8(4), 264.
<https://doi.org/10.35308/jpp.v8i4.5420>
- Skourdoumbis, A. (2023). Social Inclusivity in Teaching: In Pursuit of Students' Advanced Capabilities. *Indonesian Journal of Education and Social Studies*, 2(2), 70–82.
<https://doi.org/10.33650/ijess.v2i2.7268>
- Susilawati, S. Y., bin Mohd Yasin, M. H., & Tahar, M. M. (2023). Influencing Factors of Inclusive Education for Students with Hearing Impairment. *Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi*, 13(2), 119–125.
<https://doi.org/10.47750/pegegog.13.02.15>
- Winzer, M., & Mazurek, K. (2020). Salamanca 25 Years Later: A Commentary on Residual Dialogues of Disability and Diversity. *International Dialogues on Education Journal*, 7(1).
<https://doi.org/10.53308/ide.v7i1.9>